

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera bagian selatan. Provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 15 September 1950 yang pada saat itu meliputi wilayah Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Namun saat ini, keempat wilayah tersebut telah dimekarkan menjadi provinsi tersendiri.

Sumatera Selatan memiliki luas sekitar 87,4 ribu km² dan merupakan daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian rata-rata 79 meter di atas permukaan laut.¹ Menurut letak astronomis, Sumatera Selatan berada di 1°-4' Lintang Selatan dan 102°-106' Bujur Timur.

Sementara itu, dilihat dari posisi geografis, Sumatera Selatan berbatasan langsung dengan beberapa provinsi. Di sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Jambi; sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung; Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.²

Topografi wilayah Sumatera Selatan bagian pantai timur berupa rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sementara itu, bergeser sedikit ke arah barat, topografi wilayahnya yaitu dataran rendah yang sangat luas. Namun ketika masuk ke dalam wilayah, topografi daerahnya semakin bergunung.³

Sumatera Selatan memiliki 17 wilayah administrasi yang terdiri dari 4 Kota dan 13 Kabupaten. Adapun Kota beserta luasnya masing-masing

¹ Badan Pusat statistik Sumatera selatan, *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka tahun 2017*, (Palembang: BPS Sumatera Selatan, 2017), hlm. 2-3.

² *Ibid.*, hlm. 2-3.

³ Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup, "Data dan Informasi Lingkungan Hidup Sumatera", dalam http://ppesumatera.menlh.go.id/datin/slhd/info_umum_p/all diakses pada 15 November 2018.

yaitu: Palembang (363,68 km²), Pagar Alam (632,80 km²), Prabumulih (458,11 km²), Lubuk Linggau (365,49 km²). Serta Kabupaten: Ogan Komering Ilir (17.086,39 km²), Musi Banyuasin (14.530,36 km²), Musi Rawas (6.330,53 km²), Banyuasin (12.361,43 km²), Ogan Komering Ulu (3.747,77 km²), PALI (1.844,71 km²), Musi Rawas Utara (5.836,70 km²), Empat Lawang (2.312,20 km²), Lahat (4.297,12 km²), Muara Enim (6.901,36 km²), Ogan Ilir (2.411,24 km²), OKU Selatan (4.544,18 km²), dan OKU Timur (3.397,10 km²).⁴

4.1.2 Kondisi Demografi Provinsi Sumatera Selatan

Sensus penduduk merupakan sumber data kependudukan utama yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Sejak Indonesia merdeka, sensus penduduk telah dilakukan sebanyak 6 kali yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Sumatera Selatan mencapai sekitar 8.160.901 jiwa dimana penduduk perempuan berjumlah 4.013.761 jiwa, sementara penduduk laki-laki mencapai 4.147.140 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan 1,46 % jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2010.

Berkaitan dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah, pada tahun 2016 kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan mencapai 93,35 jiwa/km². Sementara itu, untuk kepadatan penduduk di masing-masing wilayah administrasi sangatlah beragam. Walaupun Sumatera Selatan memiliki luas wilayah yang lebih kecil dibanding dengan Kabupaten/kota lain, namun tercatat bahwa kepadatan penduduk di kota Palembang merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain, yaitu mencapai 4.405,17 jiwa/km². Sedangkan kabupaten Musi Rawas memegang posisi kepadatan penduduk terendah di Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 31,75 jiwa/km². Hal tersebut dapat

⁴ *Ibid.*

dipahami karena kota Palembang merupakan ibukota provinsi yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di Sumatera Selatan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014-2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2014	2015	2016
Ogan Komering Ulu	344.932	349.787	354.488
Ogan Komering Ilir	776.263	787.513	798.482
Muara Enim	590.975	600.398	609.607
Lahat	389.034	393.235	397.424
Musi Rawas	378.987	384.333	389.239
Musi Banyuasin	602.027	611.506	620.738
Banyuasin	799.998	811.501	822.575
Ogan Komering Ulu Selatan	339.424	344.074	348.574
Ogan Komering Ulu Timur	642.206	649.394	656.568
Ogan Ilir	403.828	409.171	414.504
Empat Lawang	234.880	238.118	241.336
Pali	176.936	179.529	182.219
Musi Rawas Utara	180.266	182.828	185.315
Palembang	1.558.494	1.580.517	1.602.071
Prabumulih	174.477	177.078	179.563
Pagar Alam	132.498	133.862	135.328
Lubuk Linggau	216.270	219.471	222.870
Sumatera Selatan	7.941.495	8.052.315	8.160.901

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi sosial, budaya, dan

terutama ekonomi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula kebutuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di Sumatera Selatan. Sehingga apabila pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum mampu memenuhi kebutuhan akan hal tersebut, tentunya akan memicu benturan di dalam masyarakat.

4.1.3 Kondisi Sosial Budaya dan Agama di Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, mempunyai sekitar 1000 komunitas dengan 400 bahasa berbeda, terdapat lebih dari 600 suku, serta mempercayai 5 agama terbesar di dunia dan 1 kepercayaan, Indonesia seringkali disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi.⁵

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga mengalami kemajemukan. Selain suku asli Sumatera Selatan, terdapat banyak suku atau etnis lain yang mendiami wilayah Sumatera Selatan. Menurut Bauman, belum ada kesepakatan yang pasti tentang bagaimana mendefinisikan suku dan bagaimana suatu suku dapat terbentuk. Namun secara umum, seseorang mengidentifikasi dirinya atas suku tertentu karena beberapa hal misalnya berdasarkan keturunan, hubungan kekerabatan, kebiasaan hidup, maupun bahasa.⁶ Oleh karena itu, pada tahun 2010 BPS Indonesia berhasil mendata jumlah penduduk Indonesia di setiap provinsi berdasarkan pengakuan warga atas suku/etnis yang mereka akui. Sensus tersebut menghasilkan temuan bahwa Indonesia memiliki suku sebanyak sekitar 1.340 suku bangsa yang kemudian di kelompokkan menjadi 31 besar suku bangsa.⁷ Berikut adalah

⁵ Zane Goebel, *The Idea of Ethnicity in Indonesia*, (Tilburg Papers in Culture Studies, 2013), hlm. 2.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Mengulik Data Suku di Indonesia", dalam <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html> diakses pada 11 November 2018

⁷ Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), hlm. 2.

jumlah penduduk Sumatera Selatan pada tahun 2010 berdasarkan suku yang mereka akui:

Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Suku Tahun 2010

Suku	Jumlah Penduduk
Suku Asal Sumatera Selatan	4.120.408
Jawa	2.037.715
Melayu	602.741
Sunda	162.877
Suku Asal Sumatera Lainnya	104.386
Mingkabau	64.403
Batak	45.709
Suku Asal Lampung	44.983
Bugis	42.977
Bali	38.522
Suku Asal Banten	17.141
Suku Asal Jambi	16.198
Suku Asal Kalimantan Lainnya	10.700
Betawi	9.338
Asing/ Luar Negeri	7.429
Madura	6.532
Suku Asal Sulawesi Lainnya	6.085
Cirebon	4.552
Suku Asal Papua	3.709
Suku Asal Aceh	3.400
Suku Asal NTT	2.562
Suku Asal Maluku	2.283
Dayak	1.511
Banjar	1.442
Minahasa	987
Makasar	939
Nias	861
Suku Asal NTB Lainnya	530
Sasak	421
Gorontalo	96

Sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), 2017.

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suku asli Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dengan jumlah 4.120.408 jiwa atau 55,4%. Suku asli Sumatera Selatan ini sendiri terbagi lagi menjadi suku Palembang, Daya, Enim, Gumai, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lematang, Lintang, Lom, Mapur, Sekak, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Sekayu, Ogan, Orang Sampan, Pasemah, Pedamaran, Pegagan, Rambang, Ranau, Rawas, Saling, Semendo, Teloko, dan Ulu.⁸ Sementara itu, terbesar kedua ialah suku Jawa dengan total 2.037.715 jiwa atau 27,4%. Kemudian mengikuti yaitu suku Melayu, Sunda, dan Suku Sumatera Lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberagaman suku di Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun demikian, hingga sekarang Sumatera Selatan masih relatif kondusif dan tetap bisa menjaga kestabilan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, keberagaman di Sumatera Selatan juga terjadi di sektor agama. Di tahun 2017, persentase pengikut agama Islam sebesar 95,16%, Budha 1,53%, Khatolik 1,29%, Kristen 1,16% dan Hindu 0,86%.⁹ Adapun tabel jumlah penduduk dan agama di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

⁸ Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), hlm. 68.

⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Profil Provinsi Sumatera Selatan", dalam <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/Profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp> diakses tanggal 22 Juli 2018.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

KABUPATEN/KOTA	ISLAM	KRISTEN	KHATOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCU	TOTAL
OGAN KOMERING ULU	350.873	2.417	3.591	2.583	910	0	360.374
OGAN KOMERING ILIR	701.680	5.416	3.548	11.672	420	1	722.786
MUARA ENIM	564.583	4.036	1.560	1.425	812	0	572.418
LAHAT	424.535	2.139	1.166	35	673	1	428.550
MUSI RAWAS	400.981	4.639	2.972	1.439	167	6	410.206
MUSI BANYUASIN	599.337	5.835	1.114	2.581	118	5	608.993
BANYUASIN	789.245	8.106	1.887	3.837	2.021	2	805.098
OGAN KOMERING ULU TIMUR	600.533	6.981	10.574	15.912	583	1	634.584
OGAN KOMERING ULU SELATAN	408.581	808	183	1.658	141	1	411.373
OGAN ILIR	404.749	816	115	18	335	6	406.063
EMPAT LAWANG	329.273	296	62	8	22	0	329.661
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	172.168	376	90	2	57	0	172.693
MUSI RAWAS UTARA	187.933	673	80	1.005	2	10	189.707
KOTA PALEMBANG	1.462.459	32.892	21.128	606	56.752	28	1.573.898
KOTA PAGAR ALAM	141.689	378	299	2	131	0	142.500
KOTA LUBUKLINGGAU	213.165	2.702	1.368	24	2.548	4	219.811
KOTA PRABUMULIH	189.698	1.938	635	57	1.548	4	193.882
TOTAL	7.941.482	80.448	50.372	42.864	67.240	69	8.182.597

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kota Palembang menjadi penyumbang terbesar penduduk dengan berbagai agama yang dianut dengan jumlah 1.573.898 penduduk. Hal tersebut tidak mengherankan karena Palembang merupakan pusat ibukota provinsi yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan. Posisi kedua penyumbang penduduk terbesar yaitu kabupaten Banyuasin dengan total 805.098 penduduk. Sementara itu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menjadi kabupaten yang jumlah penduduknya paling sedikit yaitu hanya sebanyak 172.693 penduduk.

Dengan adanya agama yang beragam di Sumatera Selatan, tentu juga berimbas pada banyaknya dan beragamnya rumah ibadah yang berdiri di Sumatera Selatan. Berikut adalah tabel jumlah rumah ibadat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 4.4 Jumlah Rumah Ibadat Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Masjid	Musholla	Geraja Khatolik	Geraja Kristen	Pura	Wihara
1	Palembang	781	212	30	57	1	63
2	Ogan Ilir	332	242	2	8	0	0
3	Musi Rawas	674	81	23	6	2	2
4	Muba	478	482	0	1	0	1
5	Banyuasin	942	677	6	7	3	4
6	OKU	391	170	11	29	11	2
7	OKUT	804	1381	71	55	68	8
8	OKUS	403	140	3	8	11	1
9	OKI	811	1098	75	0	42	4
10	Muara Enim	487	150	4	3	4	3
11	Prabumulih	180	30	0	4	1	2
12	Lahat	494	83	24	3	2	0
13	Lubuk Linggau	179	117	0	0	1	4
14	Pagar Alam	216	60	4	4	0	0
15	Empat Lawang	243	42	0	1	0	0
16	Musi Rawas Utara	157	103	0	0	2	0
17	Pali	171	0	1	1	0	0
Jumlah		7,743	5,068	254	187	148	94

Sumber: Kanwil Kemenag Sumatera Selatan, 2017.

Menurut tabel di atas, umat Islam memiliki jumlah rumah ibadat terbanyak dibanding dengan agama-agama lain, yaitu dengan total sebanyak 12.811 masjid/musholah yang tersebar di seluruh daerah Sumatera Selatan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Damai (*Zero Conflict*) dan Dampaknya di Sumatera Selatan

Konflik merupakan suatu hal tidak dapat dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai jenis konflik yang terjadi di dalam masyarakatnya. Merujuk pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang bersifat heterogen dimana memiliki begitu banyak pulau, suku, ras, agama, serta bahasa yang hidup dalam tubuh bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut

tentu menjadi sumber kekayaan budaya bagi Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, perbedaan yang ada antar suku, agama, dan ras tersebut dapat menjadi sumber konflik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Suparlan, ada tiga indikator yang dapat menjadi *trigger* terjadinya konflik di Indonesia. Adapun diantaranya yaitu: pertama, lambang negara Indonesia, dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika lebih menekankan pada corak keragaman suku bangsa. Padahal sebaiknya yang perlu ditekankan adalah kekayaan budaya yang di dalamnya terdapat keanekaragaman budaya. Hal tersebut memiliki makna bahwa bangsa Indonesia selama ini lebih fokus kepada perbedaannya bukan persatuannya. kedua, sistem otoriter-militeristis yang pernah terimplementasi di Indonesia juga menjadi sebab utama penyebab munculnya konflik. Pada masa itu, terdapat berbagai penyimpangan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah tingginya tingkat korupsi, nepotisme, dan kolusi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya manipulasi hukum dan SARA yang memberikan efek pada munculnya rasa ketidakadilan. Indikator terakhir yaitu masyarakat yang tidak bersifat demokratis. Indonesia memang dikenal sebagai negara demokrasi. Namun nyatanya, masih banyak kecacatan dalam pengimplementasian demokrasi tersebut. Hal tersebut tentu dapat menjadi penyebab konflik karena ketiadaan sifat demokratis di negara yang demokrasi.¹⁰

Ada begitu banyak catatan sejarah kelam bagaimana konflik yang dilatarbelakangi perbedaan suku, agama, maupun ras menjadi momok bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tercatat bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki sejarah konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Namun memang dari Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga Indonesia

¹⁰ Parsudi Suparlan, *Bhinneka Tunggal Ika; Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*, (Jurnal Antropologi Indonesia, 2003), hlm. 72.

mencapai usia 73 tahun, terdapat beberapa provinsi yang bersih dari catatan konflik SARA.

Sumatera Selatan merupakan salah satu dari sedikit provinsi yang tidak memiliki sejarah konflik SARA terutama konflik bernuansa agama yang terjadi di wilayahnya. Kondisi ketiadaan Konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) di wilayah Sumatera Selatan ini kemudian disebut dengan *zero conflict*. *zero conflict* merupakan status atau predikat yang digunakan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Alex Noerdin yang menjabat dua periode yaitu sejak 7 November 2008 hingga 21 September 2018. Pelekatan predikat tersebut kepada Sumatera Selatan digunakan untuk merepresentasikan kondisi damai Provinsi Sumatera Selatan yang nihil akan sejarah konflik SARA terutama konflik bernuansa agama.

Alex Noerdin mulai mencetuskan predikat *zero conflict* di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017. Hal ini dilakukan terutama dalam mempromosikan Sumatera Selatan di kancah internasional khususnya dalam menghadapi kegiatan olahraga terbesar se-Asia yaitu *Asian Games* 2018 dimana Sumatera Selatan bersama dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi tuan rumah kegiatan tersebut. Penjelasan tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kasubid Kewaspadaan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 September 2018, Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si yang menyatakan bahwa:

Di Sumatera Selatan, *zero conflict* mulai dicetuskan pada tahun 2017 oleh Gubernur Sumatera Selatan pada masa itu yaitu Bapak Alex Noerdin. Hal ini terutama bertujuan untuk mempromosikan Sumatera Selatan dalam menghadapi *Asian Games* 2018. Bahwa Sumatera Selatan merupakan daerah yang aman dari gangguan keamanan sosial.

Ketiadaan konflik SARA terutama konflik bernuansa agama di Provinsi Sumatera Selatan diperkuat dengan pernyataan-pernyataan dari perwakilan berbagai instansi melalui wawancara tatap muka yang

dilakukan peneliti. Adapun beberapa instansi yang berhasil ditemui yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, Kodam II/Sriwijaya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, FKUB (Forum Kerukunan Umat Bragama) Provinsi Sumatera Selatan, dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Provinsi Sumatera Selatan.

Kesbangpol merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. Menurut Kasubid Penanganan Konflik bidang Kewaspadaan, Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 September 2018, menyatakan bahwa:

Sumatera Selatan ini tidak pernah mengalami konflik SARA. Apalagi konflik bernuansa agama. Hubungan antar masyarakat berbeda agama di Sumatera Selatan tetap harmonis dikarenakan dalam pergaulan sehari-hari mereka tidak membicarakan soal agama melainkan soal pekerjaan, dan kehidupan sosial lain sehingga tidak muncul adanya gesekan antar umat atau konflik agama di Sumatera Selatan.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Sumatera Selatan merupakan daerah yang damai dan kondusif. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, H. Drs. Ong Burlian, M.M. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 November 2018. Ong Burlian menyatakan secara singkat bahwa Sumatera Selatan merupakan provinsi yang aman dan terbebas dari konflik SARA terutama konflik bernuansa agama. Adapun pernyataan yang beliau lontarkan yaitu: *“Ya Alhamdulillah, Sumatera Selatan hingga saat ini masih kondusif, aman, tenteram dan tidak ada masalah berkaitan dengan konflik SARA.”* Burlian juga mengungkapkan bahwa *zero conflict* merupakan kondisi dimana

suatu daerah dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya aman dari konflik melainkan juga mencakup kondisi sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik. Pernyataan tersebut disimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 November 2018. Burlian mengatakan bahwa:

Zero conflict tidak hanya menyangkut keamanan saja, namun juga mencakup masalah ketertiban masyarakat, infrastruktur, sarana olahraga, bandar udara, akomodasi, konsumsi, termasuk tidak ada masalah mengenai polusi udara, air, dan tanah. Pada saat itu, Gubernur Sumatera Selatan memberikan perhatian penuh terhadap hal-hal tersebut karena Sumatera Selatan merupakan tuan rumah bagi banyak kegiatan baik yang berskala nasional maupun internasional.

Sejalan dengan itu, staf intel Kodam II/Sriwijaya, Mayor Ali Rahim juga mengatakan bahwa wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang dinaungi oleh Kodam II/Sriwijaya yang terdiri dari 5 (lima) provinsi, diantaranya: Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Daerah tersebut merupakan daerah yang relatif aman dan kondusif. Terutama Provinsi Sumatera Selatan yang tidak memiliki sejarah terjadinya konflik bernuansa agama. Hal tersebut disimpulkan dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 November 2018. Mayor Ali Rahim menyatakan bahwa:

Di Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah terjadi konflik SARA. Untuk konflik SARA kita sampai saat ini *zero conflict*. Di sini, konflik yang sering terjadi itu konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Jadi di Sumatera Selatan memang relatif aman dan kondusif. Dan sejauh ini, menurut catatan dan pengamatan saya, konflik bernuansa agama belum pernah terjadi di Sumatera Selatan.

Sebenarnya, beberapa insiden yang mengarah pada konflik bernuansa agama pernah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2018 ini, telah terjadi sebuah insiden di daerah Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Yaitu telah terjadi perusakan sebuah gereja Katolik Santo Zakaria oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejadian tersebut juga dibenarkan oleh Wadir Intelkam Polda

Sumatera Selatan, AKBP Hery Widagdo, S.E., M.M yang terjun langsung ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan menangani insiden tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 November 2018, AKBP Hery Widagdo mengatakan bahwa:

Pernah terjadi insiden pengrusakkan gereja di daerah Rantau Alai. Saat itu, saya yang langsung terjun ke lapangan. Setelah diselidiki, ini murni kriminal bukan konflik bernuansa agama. Namun memang sebelum insiden ini meluap, kami langsung menangani kasus tersebut. Dalam mengatasi insiden itu, kami juga bekerja sama dengan sektor lain. Kami berharap jangan sampai insiden ini menjadi *trigger* terjadinya konflik SARA yang lebih luas lagi dan merusak citra damai yang telah ada di Sumatera Selatan ini.

Insiden tersebut merupakan salah satu contoh bahwa Sumatera Selatan juga masih memiliki potensi konflik yang kalau tidak diatasi dengan segera dapat memicu benturan dan kekerasan antar kelompok. Akan tetapi, sejauh ini potensi konflik tersebut hanya bersumber dari perselisihan yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah. Hingga sekarang, belum pernah ada potensi konflik benuansa agama yang bersumber dari permasalahan konteks maupun substansi ajaran agama. Sebagai contoh potensi konflik yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan yang ditimbulkan oleh gerakan atau aliran-aliran kepercayaan yang tidak sesuai atau menyimpang dengan ajaran agama yang telah disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kasubid Penanganan Konflik bidang Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam wawancara tatap muka pada tanggal 11 September 2018, Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si yang menyatakan bahwa:

Dalam catatan saya, selama ini hanya terjadi dua peristiwa secara kasat mata seperti konflik agama. Insiden pertama terjadi di daerah Kertapati yaitu terkait pembangunan vihara dan insiden yang kedua yaitu perehaban gereja untuk membuat gereja menjadi lebih besar. Namun kedua konflik tersebut telah diselesaikan melalui FKUB (Forum Kerukunan Umat beragama) secara persuasif. Jadi sebenarnya masalah agama yang terjadi Sumatera Selatan selama ini bukan karena konteks (isi agama) namun lebih kepada

permasalahan pembangunan rumah ibadat yang kemudian dapat dengan mudah diselesaikan karena telah ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

Di sisi lain, Staf Kantor Wilayah Kementerian Agama bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama, Bapak Rivai Saidi berpendapat bahwa Sumatera Selatan juga tidak terbebas dari keberadaan aliran-aliran kepercayaan yang sering menimbulkan keresahan di daerah provinsi lain seperti Gerakan Fajar Nusantara dan Ahmadiyah. Namun, menurutnya jumlah anggota aliran kepercayaan tersebut di Sumatera Selatan sangatlah sedikit. Selain itu, mereka hanya melakukan ritual ibadah maupun pergerakan lain secara independen dan tidak terbuka. Hal tersebut menjadi penyebab aliran tersebut tidak begitu berkembang dengan pesat di Sumatera Selatan. Penjelasan tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2018. Bapak Rivai Saidi menyatakan bahwa:

Kalau gambaran secara umum, kondisi Sumatera Selatan memang cenderung baik dan kondusif. Kalau dibilang *zero conflict* ya bisa dikatakan demikian. Namun memang masih ada sedikit benturan-benturan yang terjadi di beberapa titik. Yang ditakutkan itu adalah keberadaan adanya aliran-aliran sempalan seperti Gerakan Fajar Nusantara atau Ahmadiyah. Tidak dapat dipungkiri, mereka ini ada di Sumatera Selatan. Namun gerakannya tidak terbuka dan belum diketahui dengan pasti. Mereka hanya melakukan gerakan independen sehingga tidak memicu konflik di Sumatera Selatan.

Dari berbagai wawancara yang dilakukan oleh peneliti di beberapa instansi maupun organisasi di Sumatera Selatan, semua instansi tersebut sepakat bahwa Sumatera Selatan merupakan wilayah yang relatif kondusif dan aman. Dan yang paling utama ialah Provinsi Sumatera Selatan terbebas dari sejarah meletusnya konflik SARA terutama konflik bernuansa agama. Kondisi tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *zero conflict*.

4.2.1.1 Dampak Positif Status *Zero Conflict* di Sumatera Selatan

Status *zero conflict* telah melekat dengan Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2017. Dengan adanya status tersebut tentu memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan wilayah Sumatera Selatan. Baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan berdampak positif bagi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, dalam wawancara tatap muka yang dilakukan pada tanggal 11 September 2018, Kasubid Penanganan Konflik bidang Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si menyatakan bahwa:

Dengan adanya status *zero conflict*, harapannya adalah Sumatera Selatan dapat dikenal baik di kancah nasional maupun internasional. Hal tersebut juga berguna untuk mengundang investor masuk ke Sumatera Selatan agar mau menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Dengan banyaknya investor yang datang, akan terbuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat diminimalisir. Salah satu kriteria agar investor mau menginvestasikan modalnya adalah rasa aman. Apabila suatu daerah tersebut tidak aman, tidak ada investor yang mau berinvestasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Selatan berusaha untuk mempromosikan Sumatera Selatan sebagai daerah *zero conflict*.

Kondisi *zero conflict* tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, namun juga memberikan dampak positif bagi interaksi dalam hubungan bermasyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. sehingga setiap masyarakat beragama dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ritual keagamaan dan ibadahnya masing-masing tanpa diliputi rasa terancam dan khawatir. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Selatan dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 September 2018, Prof. Aflatun Muchtar menyatakan bahwa:

Dengan adanya *zero conflict*, pemerintah dapat melaksanakan program-programnya dengan baik tanpa hambatan. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan pendidikan, mensejahterakan masyarakat. Umat beragama juga bisa

beribadah dengan tenang tanpa hambatan. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar.

Memperkuat kedua pendapat tersebut di atas, melalui wawancara yang dilakukan di Kodam II/Sriwijaya bersama Mayor Ali Rahim selaku staf Intelkam Kodam II/Sriwijaya, Mayor Ali Rahim juga memberikan pandangannya terkait dengan manfaat yang dihasilkan dengan adanya status *zero conflict* yang tersemat di Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya, *zero conflict* memiliki posisi *bargaining* yang kuat untuk menarik investor agar berkeinginan menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018, Mayor Ali Rahim menegaskan bahwa:

Hal tersebut jelas sangat berdampak positif. Dengan adanya *zero conflict* di Sumatera Selatan sangat berpengaruh positif terhadap semua aspek kehidupan baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, ideologi, maupun keamanan sendiri. Karena dengan adanya *zero conflict*, orang maupun pelaku usaha dan komponen-komponen lain di dalam masyarakat, mereka tidak merasa khawatir untuk melakukan kegiatan baik dalam bentuk investasi maupun kegiatan lain. Ada munculnya rasa keamanan. Kodam dan seluruh elemen di Sumatera Selatan berusaha untuk menjaga kondisi ini, jadi ada semacam rasa ingin mewujudkan atau menjadikan Sumatera Selatan seperti rumah sendiri. Jadi kan kalau di rumah sendiri itu, ada muncul rasa aman dan nyaman. Jadi, dengan adanya *zero conflict* kita ingin menumbuhkan rasa aman di wilayah Sumatera Selatan.

Melalui berbagai pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya status *zero conflict* yang dicetuskan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, hal tersebut sangat memberikan dampak positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat Sumatera Selatan. Dampak positif tersebut tentunya memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

4.2.2 Strategi Pemerintah Sumatera Selatan dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upayanya mencegah terjadinya konflik bernuansa agama guna mempertahankan status *zero conflict* tidak bekerja secara individual. Terdapat banyak instansi/lembaga, organisasi, forum, bahkan masyarakat juga turut memberikan sumbangsih sesuai bidang dan keahlian masing-masing dalam mencegah terjadinya konflik bernuansa agama dan menjaga kondusivitas Provinsi Sumatera Selatan. Kinerja pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial yang termasuk di dalamnya ialah konflik bernuansa agama sebenarnya telah dipermudah oleh pemerintah pusat dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang konflik sosial, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki pedoman dalam menangani berbagai dinamika konflik sosial yang terjadi di daerahnya. Kemudian selanjutnya kinerja dan sinergitas antar lembaga dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi kunci kesuksesan dalam menangani potensi konflik sosial yang ada.

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengurus hal-hal berkaitan dengan konflik sosial. Untuk memfokuskan kerja dalam mengatasi konflik sosial (termasuk di dalamnya konflik bernuansa agama), Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan memiliki Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial. Bahkan, dengan sinergitas yang terbangun kuat dalam Provinsi Sumatera Selatan, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumatera Selatan berhasil mendapat peringkat ketiga dalam upaya penanggulangan konflik sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubid Penanganan Konflik bidang Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 September 2018, Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si menyatakan bahwa:

Sumatera Selatan mendapat peringkat ketiga dalam penanggulangan konflik. Prestasi ini dicapai karena adanya koordinasi antar instansi baik yang ada di provinsi maupun kabupaten di Sumatera Selatan. Pemerintah melalui badan Kesbangpol, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik kepolisian, TNI, BIN, maupun kejaksaan. Kita menggali informasi dan melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang bisa menjadi pemicu konflik. Jadi, Kesbangpol merupakan wadah untuk mengadakan perkumpulan berbagai instansi. Kesbangpol berfungsi untuk menyatukan berbagai instansi tersebut. Kesbangpol menjadi tangan untuk instansi-instansi tersebut guna menyampaikan berbagai informasi terkait potensi konflik ke Gubernur. Jadi apabila konflik tersebut terlihat penting dan sulit diatasi, kita akan mengadakan rapat koordinasi. Namun, jika permasalahannya masih dalam skala kecil, diusahakan untuk dapat diatasi pada level bawah. Jadi setiap kesbangpol baik provinsi maupun kota dan kabupaten melakukan SOP yang sama. Kesbangpol tingkat kabupaten setiap hari mengirimkan laporan-laporan ke kesbangpol provinsi, sehingga setiap potensi konflik dapat diatasi dengan cepat. Sehingga potensi konflik tersebut tidak tumbuh menjadi konflik yang nyata.

Selain itu, guna memaksimalkan peran Kesbangpol dalam menanggulangi atau mencegah konflik bernuansa agama, melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, dibentuklah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). FKUB ini kemudian menjadi corong utama dan *partner* utama pemerintah dalam mempromosikan kerukunan umat beragama. Untuk memaksimalkan kinerjanya, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kesbangpol telah berhasil membentuk FKUB di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si yang menyatakan bahwa:

Kita (Kesbangpol) juga membangun FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dimana terdapat perwakilan dari setiap Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) yang bekerja sama dengan kepentingan agama. Jadi jika terdapat permasalahan atau potensi konflik agama, kesbangpol mengajak FKUB untuk melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait konflik untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Selaku ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Prof. Aflatun Muchtar melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 September

2018 juga membeberkan bagaimana kontribusi FKUB menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah dan mengatasi konflik bernuansa agama yang selama ini terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, FKUB melakukan koordinasi dan komunikasi antar instansi. Selain itu, FKUB juga secara langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya lagi, terciptanya keharmonisan dan kerukunan di wilayah Sumatera Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menciptakan hubungan yang komunikatif antara pemimpin dan tokoh agama. Kemudian, pemerintah juga mampu menggerakkan berbagai forum/ organisasi untuk mempromosikan nilai-nilai damai. Sehingga dari berbagai sudut organisasi ikut berperan dalam terciptanya kedamaian. Di sisi lain, tokoh-tokoh agama juga selalu melakukan pembinaan-pembinaan kepada generasi muda untuk selalu menjaga kerukunan. Jadi salah satu kuncinya juga berada di tangan tokoh agama, dimana para pemuka agama tidak memprovokasi kebencian antar umat beragama. Dan faktor terakhir menurutnya adalah sifat masyarakat Sumatera Selatan yang cenderung toleran dan menghargai perbedaan. Faktor-faktor tersebut sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan. Dalam wawancara pada tanggal 12 September 2018, ketua FKUB Sumatera Selatan, Prof. Aflatun Muchtar menyatakan bahwa:

Selama ini yang kita lakukan yaitu koordinasi dan komunikasi antar instansi. Hal ini tidak terlepas dari Kementerian Agama (binmas dari berbagai agama) yang mana komunikasinya berjalan dengan baik. Kita juga tidak terlepas dari Majelis Ulama karena mayoritas warga beragama Islam. Kemudian kita juga menyerukan pada perwakilan tiap-tiap agama untuk melakukan sosialisasi kepada umatnya masing-masing hal-hal apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal menjaga kerukunan umat beragama. Antara tokoh-tokoh agama juga mengadakan pertemuan dan diskusi untuk

menghasilkan toleransi, saling menghargai dan yang paling penting tidak menjadi provokator. Selain itu, kita juga selalu mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop baik oleh Kementerian Agama maupun FKUB sendiri dengan mengundang para tokoh agama, tokoh pemuda dengan mensosialisasikan bagaimana memelihara kerukunan umat beragama.

Selain bekerja sama dengan Kesbangpol dan FKUB Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara yang memiliki tugas untuk melindungi, mempertahankan serta memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Mengingat konflik sosial terutama konflik/kekerasan yang mengatasnamakan agama merupakan konflik yang menyebabkan korban jiwa paling banyak sepanjang sejarah di Indonesia. Konflik sosial tersebut tentunya juga dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan secara proaktif selalu melibatkan TNI dalam mengatasi dan mencegah potensi terjadinya konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan.

Melalui wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Mayor Ali Rahim selaku staf Kodam II/Sriwijaya memberikan tanggapannya mengenai peran aktif TNI dalam mencegah terjadinya konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan. Menurutnya, TNI berperan aktif melaksanakan kegiatan intelijen dengan melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Melalui wawancara pada tanggal 22 November 2018, Mayor Ali Rahim menyatakan bahwa:

Kita ada melaksanakan kegiatan intelijen dengan melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat. Dalam artian kita mencoba memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sehingga dengan upaya kita melaksanakan penggalangan, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu yang bertujuan untuk merusak dan menciptakan kondisi tidak nyaman di wilayah Sumatera Selatan ini. Di samping itu juga ada keterlibatan unsur unsur lain, misalnya Babinsa yang secara keseharian mereka bersentuhan langsung

dengan masyarakat. Jadi Babinsa ini memberikan pencerahan ke masyarakat, memberikan informasi-informasi ke masyarakat ketika muncul polemik-polemik yang mengarah kepada potensi konflik terutama berkenaan dengan SARA sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi.

Selain proaktif mengajak TNI dalam usaha pencegahan konflik, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan juga melibatkan unsur Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polri merupakan alat negara yang memiliki peran untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna menjamin keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, segitiga pemerintah – TNI – Polri merupakan unsur utama dalam menegakkan keamanan wilayah dari berbagai ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Di dalam Polri, terdapat bidang Intelkam (Intelijen Keamanan) yang bertugas untuk melakukan penggalangan dan bekerja sama dengan sektor atau instansi lain dalam melakukan cipta kondisi yaitu menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu untuk menghilangkan berbagai hambatan-hambatan. Dalam hal ini, Intelkam Polda Sumatera Selatan berusaha penuh dalam menciptakan kondisi Sumatera Selatan yang aman dan kondusif. Salah satunya adalah menjaga Sumatera Selatan untuk terhindar dari konflik bernuansa agama dan tetap mempertahankan status *zero conflict*. Melalui wawancara yang dilakukan, Wakil Direktur Intelkam Polda Sumsel, AKBP Hery Widagdo menjelaskan bagaimana peran aktif Polri dalam mencegah terjadinya konflik bernuansa agama di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui wawancara tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2018, AKBP Hery Widagdo menyatakan bahwa:

Dalam hal ini, Intelkam melakukan penggalangan, kemudian berkoordinasi dengan lintas sektoral seperti Kesbangpol, MUI, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (dimana untuk tingkat Provinsi terdiri dari: Gubernur, kejaati, Kemenkumham, Kesbang, Kapolda. Sedangkan tingkat kabupaten terdiri dari: Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan, dan sebagainya). Selain itu, Polda juga melakukan

proses penegakan hukum yang profesional yang ditegakkan oleh direktorat kriminal umum.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan upayanya untuk mencegah konflik bernuansa agama juga melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut jelas dilakukan karena Kementerian Agama merupakan instansi utama pemerintah yang menangani berbagai masalah menyangkut keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama sendiri memiliki sub bagian kerukunan umat beragama yang fokus menangani masalah berkaitan dengan interaksi umat beragama termasuk di dalamnya masalah pendirian rumah ibadat, pencatatan jumlah penduduk berdasarkan agama dan lain sebagainya. Tugas pokok sub bagian Kerukunan Umat Beragama dalam Kementerian Agama yaitu melakukan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kerukunan umat beragama. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi berbagai konflik keagamaan yang mungkin terjadi di Sumatera Selatan. Adapun peran dari Kementerian Agama sendiri, dijelaskan oleh staf sub bagian Kerukunan Umat Beragama, Bapak Rivai Saidi. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 November 2018, Bapak Rivai Saidi menyatakan bahwa:

Kita melaksanakan pembinaan, pelayanan dan bimbingan kerukunan umat beragama. Untuk program pembinaan contohnya adalah melaksanakan pembinaan dalam bentuk workshop dan dialog. Dalam tahun ini saja, alhamdulillah kementerian agama, khususnya bagian Kerukunan Umat Beragama telah menjalankan 7 kegiatan pembinaan pada tahun ini. Termasuk di dalamnya pembinaan kepada ASN, pembinaan kepada para tokoh-tokoh agama, serta dialog antar umat beragama. Kemudian kita sekarang juga menjajaki untuk membangun desa kerukunan umat beragama Provinsi Sumatera Selatan dan sudah ada 2 Kabupaten yang kita seleksi yaitu Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten Banyuasin. Jadi dua Kabupaten ini yang akan kita galakkan untuk menjadi desa kerukunan.

Lebih lanjut lagi, Saidi juga menjelaskan bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Selatan kepada masyarakat secara umum guna menegakkan kerukunan umat beragama. Hal tersebut dinyatakan dalam:

Dalam hal pelayanan. Kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait informasi data-data ulama, dan sebagainya. Selain itu, melaksanakan bimbingan pada lembaga agama, sosial, dan organisasi masyarakat. Jadi kita tidak hanya sebatas mengadakan pembinaan terhadap tokoh agama, melainkan juga kepada organisasi kemasyarakatan. Artinya kita bersinergi, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, organisasi pemuda juga. Sekarang ini kita sudah punya Forum Pemuda Umat Beragama. Di dalam Forum Pemuda Umat Beragama tersebut sudah termasuk di dalamnya HMI, PMII, PHDI, Pemuda Katolik. Jadi tidak hanya bersinergi dengan organisasi Islam. Jadi jaringan kita sudah luas.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mengajak berbagai forum atau organisasi untuk ikut serta secara aktif membangun kondisi Sumatera Selatan yang *zero conflict*. Salah satu forum yang bersinergi secara baik dengan pemerintah yaitu FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). Sama halnya dengan FKUB, sebetulnya FKDM ini juga merupakan rujukan dari pemerintah pusat melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018. Jadi sebenarnya FKDM terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan/ desa. Dengan keberadaan FKDM ini, pemerintah berharap dapat membantu setiap daerah guna menjaga stabilitas keamanan wilayahnya. Begitu juga dengan pemerintah Sumatera Selatan yang berharap dengan aktif mengajak FKDM ikut serta dalam menjaga keamanan wilayah, Sumatera Selatan dapat mempertahankan status *zero conflict*. Adapun peran dari FKDM sendiri diungkapkan oleh Ketua FKDM Provinsi Sumatera Selatan melalui wawancara pada 14 November 2018, Drs. Ong Burlian, M.M. menyatakan bahwa:

FKDM sendiri berperan sebagai mata dan telinga pemerintah untuk memantau gejolak, maupun gejala potensi konflik yang mungkin

terjadi di masyarakat. Dimana fungsi FKDM sendiri untuk menjangkau setiap informasi, menganalisis informasi tersebut. Sesuai dengan tingkatannya, informasi yang didapat tersebut akan diteruskan kepada Gubernur. Sementara FKDM Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan Bupati, begitu juga dengan FKDM tingkat kecamatan yang akan meneruskan informasinya ke Camat. Jadi peran FKDM itu sebagai mata dan telinga pemerintah untuk memantau setiap gejala-gejala konflik yang akan timbul dalam kehidupan masyarakat.

Dengan ikut aktifnya berbagai instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam mencegah terjadinya konflik bernuansa agama, Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan berharap hal tersebut dapat menjadikan wilayahnya tetap aman dan kondusif serta dapat mempertahankan status *zero conflict*. Mengingat dengan adanya status *zero conflict*, pemerintah mendapatkan banyak manfaat yang sangat menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha secara maksimal dan menerapkan berbagai strategi yang dapat dijalankan di Provinsi Sumatera Selatan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kondisi Damai (*Zero Conflict*) di Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan telah dikenal luas sebagai wilayah yang aman dan kondusif. Keadaan aman tersebut terutama disebabkan karena nihilnya konflik atau kekerasan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) terutama konflik bernuansa agama. Kondisi damai tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *zero conflict*.

Status atau predikat *zero conflict* tersebut awal mulanya dicetuskan pada tahun 2017 oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan selama 2 (dua) periode. Selama menjabat sebagai Gubernur, Alex Noerdin dengan gencar selalu mempromosikan kondisi damai (*zero conflict*) di wilayah Sumatera Selatan. Bukan hanya mempromosikan Sumatera Selatan *zero conflict* di kancah nasional namun juga di kancah internasional. Salah satu usaha promosinya ialah pada bulan september 2017, ketika Menko

Polhukam Wiranto menghadiri kegiatan apel akbar 5000 mahasiswa se-Sumatera Selatan di kampus UIN Raden Fatah Palembang, Wiranto sangat mengapresiasi kondisi *zero conflict* di Sumatera Selatan.¹¹

Promosi gencar yang dilakukan oleh Alex Noerdin terkait *zero conflict* Sumatera Selatan bukan sekedar “komoditi politik” semata. Karena pada kenyataannya Sumatera Selatan memang tidak pernah mengalami konflik SARA terutama konflik bernuansa agama.

Hal tersebut dibuktikan dengan Sumatera Selatan yang meraih prestasi ketiga se-Indonesia dalam upaya penanganan konflik sosial. Selain itu, berbagai instansi yang menangani konflik sosial di Sumatera Selatan seperti TNI, Polri, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), serta FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) juga mengatakan bahwa selama ini Sumatera Selatan minim akan konflik SARA terutama konflik bernuansa agama.

Konflik agama sendiri jika ditinjau dari jejak histori konflik/kekerasan yang terjadi di Indonesia selama ini, terbagi menjadi tiga kategori: Pertama, konflik antar umat beragama. Kedua, Konflik intern umat beragama. Dan yang terakhir adalah konflik antara umat beragama dengan aliran yang dianggap sesat.¹² Untuk kategori pertama, pelanggaran yang paling banyak yaitu hanya menyangkut soal pendirian rumah ibadat. Walaupun di beberapa provinsi konflik antar umat beragama yang terjadi lebih dari sekedar izin pendirian rumah ibadat. Sebagai contoh yaitu konflik agama di Maluku dan Poso yang menelan begitu banyak korban jiwa.

Konflik yang kedua yaitu intern umat beragama. Sejauh ini di Indonesia konflik intern umat beragama sangat jarang sekali terjadi.

¹¹ Tribun News, “Wiranto puji Alex Noerdin Wujudkan Sumatera Selatan Zero Conflict”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/29/wiranto-puji-alex-noerdin-wujudkan-sumatera-selatan-zero-conflict> diakses pada 20 November 2018.

¹² Muqoyyidin, Andik Wahyun, *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia: Signifikasi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif*, (Analisis, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012), hlm: 315.

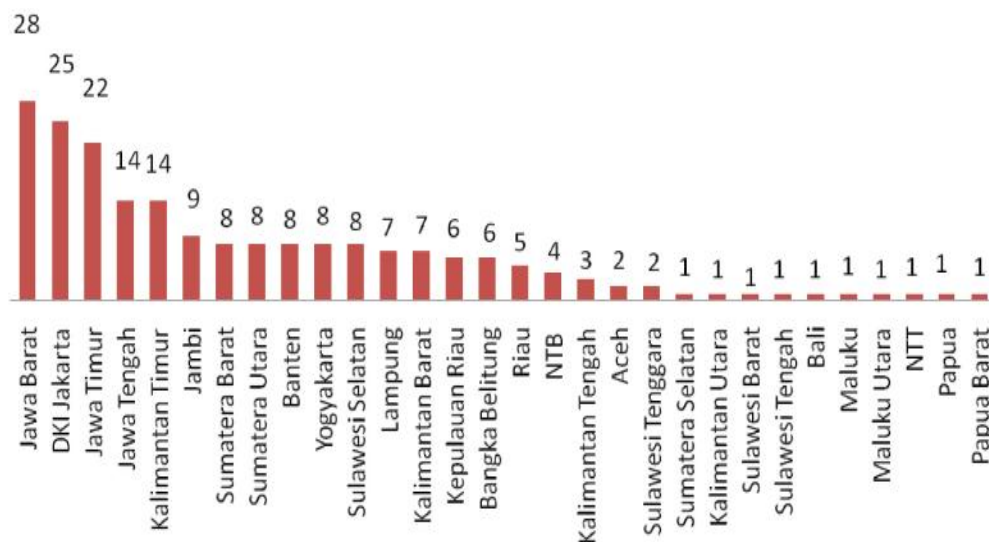
Namun salah satu kasus yang paling terkenal yaitu konflik antara Sunni-Syiah di Sampang Madura. Dan kategori konflik terakhir yaitu antar umat beragama dengan aliran yang dianggap sesat. Untuk kategori terakhir ini, bisa diambil contoh yaitu konflik yang terjadi antara umat muslim dan Ahmadiyah.

Potensi konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan hingga saat ini masih menyentuh pada taraf pembangunan rumah ibadat. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, yaitu perselisihan pembangunan Vihara di Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa. Ternyata setelah diselidiki, perselisihan tersebut terjadinya karena adanya masalah perizinan atas pembangunan Vihara tersebut. Selain itu, pada 8 Maret 2018 terdapat kasus perusakan gereja Santo Zakaria di Ogan ilir yang dapat berpotensi pada perpecahan umat. Namun setelah diteliti, masalah tersebut bukanlah murni konflik antar umat beragama. Melainkan tindakan kriminal perusakan rumah ibadat umat kristen yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Potensi konflik lain yang ada di Sumatera Selatan yaitu tumbuh dan berkembangnya aliran-aliran yang terlarang di Indonesia. Yaitu seperti Gerakan Fajar Nusantara dan Ahmadiyah. Menurut Rivai Saidi, staff Kanwil Kementerian Agama Sumsel, kedua gerakan tersebut tidak dapat dipungkiri ada di Sumatera Selatan. Hanya saja, hingga saat ini pergerakan mereka masih senyap. Oleh karena itu, pemerintah daerah Sumatera Selatan harus tetap mewaspadaai dan mengawasi pergerakan aliran-aliran sejenis yang sekiranya mampu memicu konflik dalam masyarakat.

Minimnya kasus pelanggaran kebebasan beragama di Sumatera Selatan tersebut juga dibuktikan dengan data yang dilaporkan oleh The Wahid Institute berkaitan dengan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Dari 30 provinsi yang disurvei, Sumatera Selatan bersama dengan 9 provinsi lain menduduki peringkat terakhir atas

banyaknya jumlah pelanggaran KBB yang terjadi di provinsi masing-masing.



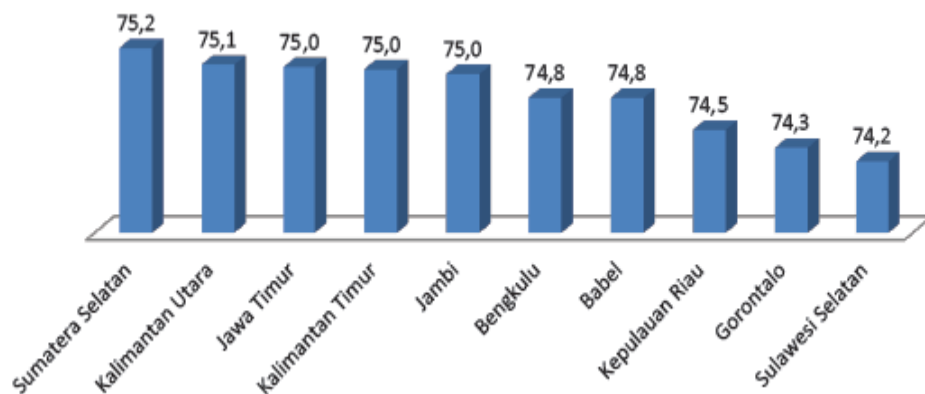
Gambar 4.5 Jumlah Peristiwa Pelanggaran KBB berdasarkan wilayah

Sumber: The Wahid Institute, 2016.

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 hanya terjadi satu kali. Hal ini tentu harus tetap menjadi perhatian penuh pemerintah karena jika hal tersebut di atas tidak diatasi dengan optimal, bisa saja akan merembet kepada kekerasan yang lebih luas seperti halnya insiden yang terjadi di Ambon.

Tingkat kerukunan beragama masyarakat di wilayah Sumatera Selatan saat ini masih tergolong tinggi. Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan dan Diklat Kementerian Agama RI, rata-rata kerukunan nasional umat beragama yaitu mendapat skor 75,36. Tingkat kerukunan tersebut dinilai dari tiga dimensi utama, yaitu: Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama. Pada masing-masing dimensi tersebut terbagi lagi menjadi sub-sub dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian Kementerian Agama terhadap tingkat kerukunan di Indonesia. Sumatera

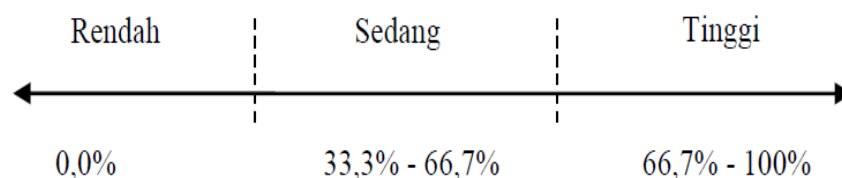
Selatan menduduki peringkat 15 dengan skor 75,2 pada tahun 2015. Adapun 14 provinsi di Indonesia yang mendapat skor di atas rata-rata nilai nasional, diantaranya yaitu: NTT, Bali, Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan NTB.



Gambar 4.6 Indeks Kerukunan Beragama

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.

Sumatera Selatan walaupun tidak memperoleh skor di atas rata-rata indeks kerukunan nasional, skor yang didapat oleh pemerintah Sumatera Selatan masih tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan telah disepakati oleh tim peneliti bahwa titik cut off-nya berada pada skor 33% dan 66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4.7 Tingkatan Skor Kerukunan Umat Beragama

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.

Pemerintah Sumatera Selatan membutuhkan upaya yang optimal untuk tetap menjaga kerukunan dan bahkan meningkatkan indeks kerukunan di Provinsi Sumatera Selatan. Jangan sampai apa yang terjadi di beberapa daerah juga ikut terjadi di Sumatera Selatan. Seperti halnya konflik agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1998 dan mengakibatkan banyak korban jiwa.

Apabila dianalisis menggunakan teori SAT (Struktural, Akselerator, *Trigger*), ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa suatu insiden (*trigger*) yang sama bisa menyebabkan konflik kekerasan di suatu daerah namun tidak berpengaruh di daerah lain.

Sebagai contoh, pembakaran atau perusakan rumah ibadat di Ambon menjadi salah satu *trigger* yang menyeret pada kekerasan massal dan beruntun. Hal tersebut dikarenakan ada begitu banyak konflik struktural yang terjadi di Ambon seperti ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang menyebabkan polarisasi berdasarkan keagamaan dalam rekrutmen jabatan-jabatan, dan diskriminasi yang dirasakan baik oleh umat Islam maupun Kristen. Faktor struktural yang begitu kental dirasakan oleh masyarakat tersebut membuat insiden-insiden kecil yang terjadi di Ambon menjadi *trigger* dan akselerator terjadinya kekerasan di Ambon.

Berbeda halnya dengan kondisi di Sumatera Selatan yang memang sudah relatif aman dan kondusif. Karakteristik masyarakat Sumatera Selatan yang saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan, tradisi hidup berdampingan secara damai antar suku dan agama yang berbeda, sikap beragama masyarakat Muslim dan Kristen yang moderat, tidak radikal serta adanya ungkapan “tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu” merupakan beberapa alasan mengapa hingga saat ini Sumatera Selatan tetap kondusif.

Beberapa festival yang ada di Sumatera Selatan juga menjadi ajang pertemuan dan secara tidak langsung meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat. Seperti festival tahun baru imlek yang setiap tahun rutin dilaksanakan di Pulau Kemaro di Sumatera Selatan. Tidak hanya

warga Tionghoa atau Budha yang datang, melainkan banyak juga warga Muslim yang berbondong-bondong untuk menikmati festival yang digelar di sebuah pulau kecil di tengah sungai Musi.

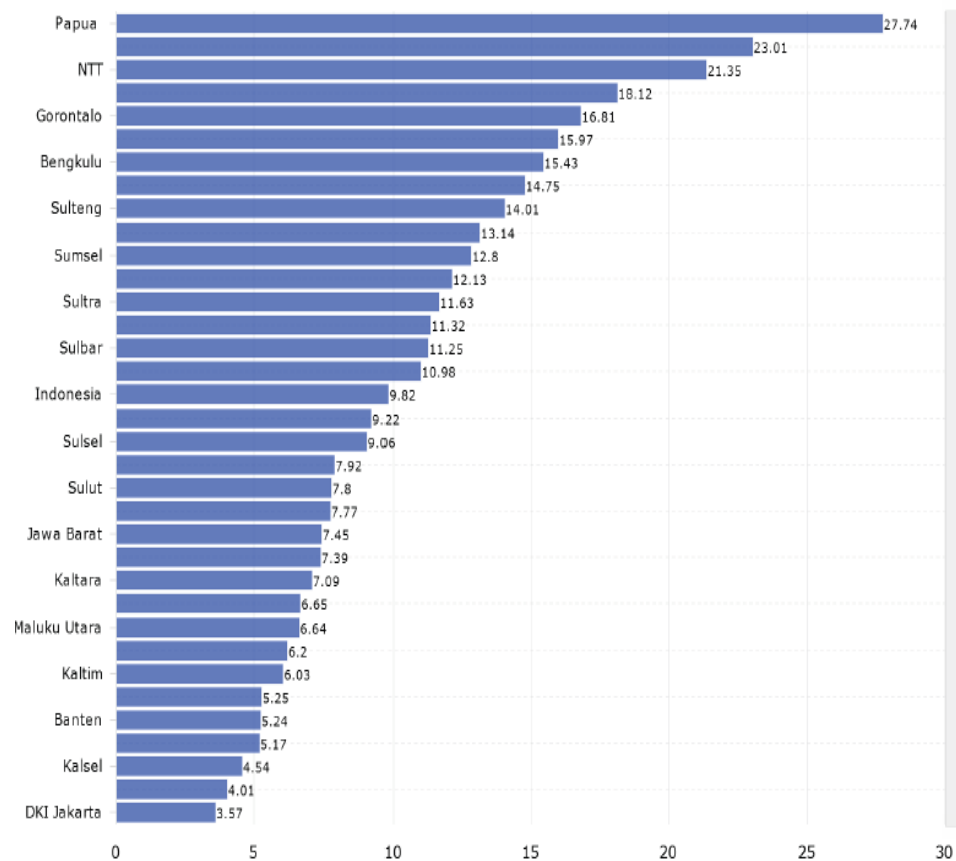
Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi modal kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan. Sehingga, insiden-insiden kecil yang terjadi seperti perusakan rumah ibadat gereja Santo Zakaria di Rantau Alai Sumatera Selatan tidak menjadi *trigger* terjadinya perpecahan antar umat yang lebih besar. Selain itu, faktor kesigapan pemerintah juga menjadi alasan utama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai instansi dan organisasi yang ada dapat langsung mengatasi hal-hal yang demikian dengan cepat.

Apabila dilihat dari kondisi antar umat beragama dan antar suku di Sumatera Selatan, memang dapat dikatakan Sumatera Selatan merupakan wilayah yang damai atau lebih dikenal dengan *zero conflict*. Akan tetapi pengertian damai yang seperti itu, menurut Galtung dimaknai sebagai damai negatif. Damai negatif yaitu dimana kondisi saat potensi transformasi konflik menjadi kekerasan fisik berhasil dikendalikan. Namun hal-hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kondisi damai absolut, karena damai negatif masih memiliki kekerasan yang terjadi baik secara struktural maupun kultural. Bagi Galtung, damai yang ideal adalah hilangnya kekerasan secara total, bukan hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan struktural dalam birokrasi dan kekerasan kultural dalam pola pikir manusia. Damai positif mengedepankan situasi dimana keadilan, kesetaraan, dan penghargaan atas hidup itu sendiri. Situasi dimana manusia hidup secara harmonis tanpa ada keinginan untuk menundukkan, menguasai, atau bahkan mematikan hak hidup orang lain.

Menurut teori damai yang dijabarkan oleh Johan Galtung, damai yang terjadi Sumatera Selatan baru sebatas damai negatif. Yaitu tidak adanya kekerasan fisik yang terjadi dalam konteks SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Apabila diteliti lebih dalam lagi, ada beberapa

masalah struktural yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan. Seperti kemiskinan dan kriminalitas.

Bahkan menurut data Badan Statistik Pusat (BPS), tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.9 Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan mencapai 12,8% dari total penduduk yang ada di Sumatera Selatan. dan Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 16 provinsi yang memiliki presentasi jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibanding dengan presentase rata-rata jumlah penduduk miskin di Seluruh Indonesia.

Tolak ukur lain yang menjadi penilaian atas level kondisi damai pada suatu daerah yaitu tingkat kriminalitas. Adanya kriminalitas yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut masih berada pada level damai negatif. Sumatera Selatan merupakan daerah yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Menurut Kapolda Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain Adinegara, warga Sumatera Selatan menjadi korban tindak kejahatan per 39 menit pada tahun 2018. Walaupun angka tersebut menurun dibanding tahun 2017 yaitu tindak kejahatan terjadi setiap 33 menit. Selain itu, aksi curas dengan senjata api tercatat ada sebanyak 32 kasus dan hanya bisa diselesaikan sebanyak 14 kasus. Angka tindak pidana sepanjang 2018 mencapai 13.217 kasus.¹³

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat di Sumatera Selatan dapat menikmati kesejahteraan hidup dan keadilan ekonomi seperti yang disyaratkan Johan Galtung untuk mendapat predikat “damai positif”.

4.3.1.1 Dampak Positif Status *Zero Conflict* di Sumatera Selatan

Kondisi Sumatera Selatan yang damai atau *zero conflict* memberi manfaat positif tidak hanya bagi pemerintah daerah melainkan juga pemerintah pusat. Secara khusus, terdapat beberapa dampak positif yang dirasakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya predikat *zero conflict*. Salah satu diantaranya yaitu tingginya minat investasi di Sumatera Selatan yang berimplikasi pada peningkatan pembangunan dan ekonomi. Tentunya para investor tidak akan mempertaruhkan bisnis mereka di sebuah wilayah yang rawan konflik walaupun kondisi wilayah tersebut menjanjikan secara ekonomi.¹⁴

Dengan tingginya minat pelaku bisnis/usaha (investor) dari berbagai industri yang ingin menanamkan modalnya di Sumatera Selatan, hal

¹³ Nefri Inge. Liputan 6, “22 Pelaku Kriminalitas di Sumsel Ditembak Mati Sepanjang 2018”, dalam <http://www.liputan6.com/pelaku-kriminalitas-di-sumsel-ditembak-mati-sepanjang-2018/> diakses pada 7 Desember 2018.

¹⁴ Radar Palembang, “Bagaimana Ekonomi Tahun Depan”, dalam <http://www.radar-palembang.com/bagaimana-ekonomi-tahun-depan/> diakses pada 5 Desember 2018.

tersebut kemudian turut memajukan perekonomian daerah dan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur dan banyaknya investasi yang masuk tentu hal tersebut memerlukan tenaga kerja yang banyak. Sehingga tingkat pengangguran di Sumatera Selatan juga ikut berkurang.

Peningkatan perekonomian Sumatera Selatan tersebut juga dapat dilihat dari meningkatnya volume penerbangan menuju Palembang, ibu kota provinsi. Tercatat bahwa pada tahun 2011, penerbangan Palembang-Jakarta berjumlah hanya 11 kali. Sementara pada tahun 2016, penerbangan tersebut meningkat menjadi 39 kali per hari.¹⁵

Dampak positif lain yang dapat diperoleh oleh Sumatera Selatan adalah membuat wilayah Sumatera Selatan menjadi tempat yang ideal bagi berbagai kegiatan baik kegiatan berskala nasional maupun internasional. Buktinya, Sumatera Selatan berhasil menjadi host atau tuan rumah bagi banyak kegiatan dengan berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya, dan terutama olahraga. Seperti yang telah diketahui bahwa Sumatera Selatan telah menjadi tuan rumah untuk kegiatan PON (Pekan Olahraga Nasional), SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games 2011, dan terakhir yaitu Asian Games 2018.¹⁶

Selain berdampak positif pada daerah Sumatera Selatan, status *zero conflict* secara umum juga memberi manfaat bagi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dalam Buku Putih Pertahanan Negara, Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional.

Adapun tujuan nasional terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan nasional memiliki tiga makna sebagai berikut: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

¹⁵ Metro news, "Sumatera Selatan Kian Menarik Bagi Investasi Infrastruktur", dalam <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/Dkg6mQnK-sumatera-selatan-kian-menarik-bagi-investasi-infrastruktur> diakses pada 5 Desember 2018.

¹⁶ Sumatera Ekspres, "Memelihara Zero Konflik di Sumsel", dalam <https://sumeks.co.id/memelihara-zero-konflik-di-sumsel/> diakses pada 5 Desember 2018.

tumpah darah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas, dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak manapun.

Kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional.

Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai, baik lingkungan global maupun dalam negeri. Gangguan terhadap perdamaian dunia tidak hanya dipicu oleh konflik antarnegara, tetapi juga dapat berasal dari konflik internal dalam negeri.¹⁷

Jika dianalisis dari konsep pertahanan negara tersebut. Kondisi *zero conflict* atau ketiadaan konflik SARA terutama konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan tentu menjadi bagian dari tujuan nasional. Makna tujuan nasional kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum atau meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sangat terhubung dengan manfaat status *zero conflict* bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, maka berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan di Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari wilayah NKRI, tentunya peningkatan kesejahteraan di wilayah Sumatera Selatan tersebut juga membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Selain itu, jika dianalisis dengan makna ketiga dari tujuan nasional yaitu menciptakan lingkungan yang aman dari berbagai gangguan tidak

¹⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kemhan, 2015). hlm. 23.

hanya dari luar melainkan juga dari dalam negeri sendiri. Maka dengan berhasilnya Sumatera Selatan dalam mencegah terjadinya konflik SARA terutama konflik bernuansa agama berarti Sumatera Selatan mengambil bagian dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi Sumatera Selatan secara khusus, dan bagi nasional secara umum.

Oleh karena itu, diharapkan setiap provinsi yang ada di Indonesia juga menjalankan sistem pertahanan negara dengan maksimal sehingga tujuan nasional bangsa Indonesia dapat terwujud dengan optimal.

4.3.2 Strategi Pemerintah Sumatera Selatan dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama

Keberhasilan Sumatera Selatan dalam mewujudkan *zero conflict* yang ada di wilayahnya tentu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Dibutuhkan koordinasi dan sinergitas dari semua kalangan baik pemerintah daerah, instansi/lembaga, tokoh agama, akademisi, dan bahkan masyarakat. Untuk itu, Provinsi Sumatera Selatan mengimplementasikan berbagai strategi yang dapat dijalankan guna mencegah terjadinya konflik SARA terutama konflik bernuansa agama di wilayah Sumatera Selatan.

Menurut Nicolas dan Mikael, model pencegahan konflik memiliki dua bentuk, yaitu pencegahan konflik secara langsung (*direct prevention*) dan pencegahan konflik secara struktural (*structural direction*). Apabila dianalisis menggunakan model tersebut, pencegahan konflik bernuansa agama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan lebih kepada pencegahan konflik yang bersifat langsung (*direct prevention*).

Upaya pencegahan konflik yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Sumatera Selatan hanya sebatas meredam potensi konflik yang kemungkinan akan meledak menjadi sebuah kekerasan langsung. Belum ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi potensi konflik dari akar rumput. Dengan kata lain, pemerintah belum melakukan pencegahan konflik secara struktural.

Beberapa pencegahan konflik secara langsung yang telah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan yaitu melaksanakan peringatan dini dan respon dini pada isu-isu yang dinilai dapat memicu terjadinya konflik bernuansa agama. Salah satu bentuk peringatan dini yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai elemen yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Sosialisasi mengenai hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi polemik yang dihadapi oleh masyarakat global belakangan ini terkait isu terorisme dan radikalisme.

Bentuk pencegahan konflik secara langsung lain yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melaksanakan respon dini terkait potensi konflik yang terindikasi dapat menimbulkan konflik bernuansa agama. Salah satu bentuk respon dini yang dilakukan adalah dengan merespon suatu konflik dengan cepat tanggap. Perusakan gereja Santo Zakaria di Ogan Ilir pada tahun 2018 menjadi salah satu bentuk respon dini yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan. Dalam menangani kasus tersebut, Polri dan TNI di Sumatera Selatan bergerak mengusut kasus tersebut kurang dari 24 jam sejak kejadian berlangsung. Kesigapan tersebut tentu sangat penting karena perusakan rumah ibadah merupakan salah satu kasus sensitif yang dapat memicu terjadinya konflik bernuansa agama.

Selain itu, dalam menjalankan sistem respon dini, pemerintah Sumatera Selatan juga mengutamakan musyawarah dalam menghadapi kasus-kasus yang dapat memicu perpecahan umat. Musyawarah dipilih karena dapat menghindari perselisihan dan kekerasan antar pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa kasus seperti pergerakan yang disinyalir dilakukan oleh aliran-aliran kepercayaan yang masih diperdebatkan di Indonesia. Untuk menghindari kericuhan yang mungkin akan ditimbulkan dari masyarakat yang kurang setuju terhadap aliran tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan langsung

melakukan upaya preventif dengan melakukan musyawarah dengan pihak aliran tersebut. Musyawarah dilakukan untuk memperingatkan mereka agar tidak melakukan pergerakan yang dapat memicu amarah masyarakat sekitar. Sejauh ini, cara-cara tersebut berhasil dilaksanakan di Sumatera Selatan.

Peneliti juga menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Arthur Lykke untuk menganalisis pencegahan konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan. Menurut Lykke, teori strategi sangatlah sederhana dan hanya bergantung kepada tiga faktor, yaitu: *ends*, *ways*, dan *means*.¹⁸ Menurut teori ini, strategi adalah bagaimana (*ways*) kepemimpinan menggunakan kekuasaannya demi negara. Dan sangat penting untuk memastikan keadaan dan lokasi geografis demi mencapai tujuan (*ends*) yang mendukung kepentingan nasional. Sementara itu, *means* merupakan sumber-sumber yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan.¹⁹

Oleh karena itu, peneliti menganalisis strategi yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan menggunakan teori strategi yang digagas oleh Arthur Lykke. Adapun analisisnya yaitu:

1. Merumuskan Tujuan (Ends)

Ends atau *Objective* berkaitan erat dengan tujuan yang telah disesuaikan dengan dinamika perkembangan global serta memperhitungkan ancaman dan juga peluang. Melalui perumusan tujuan atau *Objective*, pembuat strategi mempertimbangkan alternatif konsep dan aksi dengan menggunakan elemen kekuatan yang tersedia.

Pemerintah Sumatera Selatan memiliki tujuan menjadikan Sumatera Selatan, terutama Palembang sebagai kota *zero conflict* dan sebagai kota pusat olahraga. Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Najib. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat serius untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai kota olahraga. Hal ini ditunjukkan

¹⁸ M. Kurtis Bans, *Strategy Development for Future Security Environment*, (Journal of Military and Information Science Vol. 3 No.3, 2015), hlm 75-77.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 75-77.

dengan atmosfir olahraga yang akan terasa sejak seseorang mendarat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II hingga menuju kota.²⁰ Senada dengan hal tersebut, Kasubid Kewaspadaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Ali Amin, S.Pd., M.Si. Beliau menyatakan bahwa *zero conflict* berguna untuk mempromosikan Sumatera Selatan dalam menghadapi *Asian Games*".

Untuk menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai kota olahraga, dibutuhkan dana yang besar, sementara itu menurut Achmad Najib, APBD Provinsi Sumatera Selatan hanya Rp. 8,976 triliun. Artinya, selain menggunakan APBN dan APBD, dibutuhkan kucuran dana dari berbagai investor untuk membangun sarana dan prasarana di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, mencegah konflik SARA terutama konflik bernuansa agama dan menjaga Sumatera Selatan tetap kondusif adalah salah satu yang menjadi pusat perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar wilayah ini terkenal dengan *zero conflict*. Kondisi *zero conflict* tersebut tentu mengundang para investor yang membutuhkan wilayah yang aman dan kondusif untuk menanamkan modal/investasi bisnisnya.

Tujuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut juga ternyata mendapat persetujuan dari masyarakat. Hal tersebut juga menjadi sebuah dukungan bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai pembangunan dengan mudah dan tanpa hambatan. Harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai kota olahraga juga berdampak pada mudahnya menjalankan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan.

2. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya (*Means*)

Setelah merumuskan tujuan, para pembuat strategi mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Para elit pembuat keputusan dapat melibatkan banyak sumber sehingga menciptakan sinergitas antara satu dengan yang lainnya. Sinergitas tersebut

²⁰ Berita Jatim, "Palembang dari Kota Pempek Menjadi Kota Olahraga", dalam http://beritajatim.com/olahraga/312515/palembang_dari_kota_pempek_ke_kota_olahrag a.html diakses pada 5 Desember 2018.

diharapkan dapat mempermudah jalannya pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam mewujudkan Sumatera Selatan *zero conflict*, Pemerintah Sumatera Selatan mempergunakan segala sarana dan prasarana yang ada di Sumatera Selatan dengan optimal.

Salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah Sumatera Selatan adalah memaksimalkan penggunaan teknologi. Kemudahan teknologi yang ditawarkan sekarang ini sangat membantu kinerja pemerintah. Dengan adanya teknologi, informasi mengenai suatu insiden yang berpotensi pada konflik atau kekerasan agama dapat langsung diterima oleh pemerintah pusat atau instansi yang terkait dalam waktu kurang dari 24 jam. Sehingga dengan adanya penyebaran informasi yang cepat tersebut sangat membantu pemerintah dalam menangani insiden tersebut.

Hal tersebut tercermin dalam penanganan kasus perusakan gereja Santo Zakaria di Rantau Alai, Ogan Ilir. Pihak Polri dan TNI mendapatkan laporan kejadian tersebut hanya dalam waktu hitungan beberapa jam saja. Sehingga, pihak pemerintah mampu mengatasi konflik dengan tanggap dan cepat sebelum menyebar menjadi sebuah tindak kekerasan.

Selain teknologi, sarana lain yang dapat menunjang upaya pencegahan konflik bernuansa agama adalah sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Dalam mengatasi potensi konflik bernuansa agama, Sumatera Selatan melakukan upaya yang bersifat preventif. Artinya, pemerintah daerah lebih fokus dalam mencegah timbulnya potensi konflik menjadi sebuah kekerasan dan menciptakan atmosfer damai di Sumatera Selatan. Untuk menjalankan hal tersebut, Pemerintah daerah dibantu oleh berbagai pihak baik dari lembaga maupun masyarakat, terutama tokoh agama. Tokoh agama menjadi salah satu sarana penting untuk menciptakan atmosfer damai di Sumatera Selatan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Sumatera Selatan percaya bahwa

ulama memiliki peran penting yang multifungsi atau polimorfik.²¹ Ulama dipercaya tidak hanya sebagai penceramah mengenai isu-isu agama tetapi juga dapat menjadi *problem solver* dalam bidang sosial, politik, agama, dan budaya. Sumatera Selatan memiliki banyak ulama yang mampu menginspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu sarana yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan *zero conflict* di Sumatera Selatan.

3. Implementasi Strategi (*Ways*)

Bagian ketiga adalah cara atau *concept*. Konsep strategi berisi cara-cara yang diformulasikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan utamanya. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi *zero conflict* dengan mencegah terjadinya konflik bernuansa agama serta membangun perdamaian di Sumatera Selatan. Semua strategi yang dilakukan pemerintah bersifat preventif, karena memang hingga saat ini belum pernah terjadi konflik atau kekerasan agama yang terjadi di Sumatera Selatan.

Cara (*ways*) dalam teori strategi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu: *strategy policy*, *strategy operational*, dan *strategy tactical*. Pada tingkatan *strategy policy*, pemerintah daerah Sumatera Selatan masih mengandalkan kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada peraturan atau kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan konflik bernuansa agama. Karena memang hingga saat ini, belum ada konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Sumatera Selatan.

Untuk mencegah atau menghadapi potensi konflik bernuansa agama, pemerintah pusat memiliki Undang-Undang tentang Penanganan

²¹ Azhar Ali, *Definisi Ulama dan Perannya dalam Pandangan Masyarakat Palembang Era Kontemporer*, (Tesis, Palembang IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 5.

Konflik Sosial No. 7 tahun 2012 (UU PKS). UU PKS berisikan pedoman bagi setiap pemerintah daerah untuk melakukan penanganan konflik. Penanganan konflik ini sendiri terdiri dari serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan terencana dalam situasi baik sebelum, pada masa, dan maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Selain itu, dalam UU PKS No. 7 tahun 2012 ini juga menjelaskan secara komprehensif mengenai tujuan penanganan konflik, ruang lingkup penanganan konflik, sumber konflik, serta sistem penanganan konflik.

Sebagai daerah yang belum pernah menghadapi konflik bernuansa agama, pemerintah daerah Sumatera Selatan mengimplementasikan UU PKS bagian pencegahan konflik. Dalam pasal 6 UU PKS No. 7 tahun 2012, pencegahan konflik dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu:

- a. Menciptakan kondisi damai dalam kehidupan masyarakat
- b. Membuat sistem penyelesaian konflik secara damai
- c. Mengurangi potensi konflik
- d. Mengembangkan sistem peringatan dini

Fokus utama pemerintah daerah dalam pencegahan konflik yaitu dalam menciptakan kondisi damai dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan petunjuk UU PKS No. 7 tahun 2012, Pemerintah daerah Sumatera Selatan dapat menerapkan beberapa hal yang dapat meningkatkan kondisi damai, seperti: mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhineka-tunggalikaan, serta menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Pada poin membuat sistem penyelesaian secara damai, pemerintah daerah Sumatera Selatan menerapkan sistem penyelesaian konflik secara musyawarah dan mufakat. Dan hingga saat ini, hal tersebut mampu dilaksanakan dengan baik oleh berbagai pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan. Untuk poin mengurangi potensi konflik, pemerintah daerah Sumatera Selatan menerapkan beberapa hal, yaitu seperti; menerapkan hukum tanpa memihak kelompok tertentu, melakukan program perdamaian: seperti rencana membangun desa kerukunan di Banyuasin, serta mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat.

Poin terakhir dalam pencegahan konflik yaitu mengembangkan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini atau CEWERS merupakan salah satu agenda yang diterapkan pemerintah daerah untuk mencegah konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan. Dalam sistem peringatan dini, pemerintah daerah dalam hal ini mendelegasikan tugas tersebut ke beberapa instansi terkait, seperti Polri dan TNI. Sistem peringatan dini yang diimplementasikan sejauh ini sebatas penyebaran informasi ke masyarakat secara umum untuk mengantisipasi meledaknya potensi konflik yang ada. Sebagai contoh yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan dari radikalisme. TNI memiliki Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang berhadapan paling langsung dengan masyarakat. Babinsa menjadi ujung tombak informasi awal operasi militer selain perang.

Selain mengajak berbagai instansi/lembaga daerah yang memiliki intel seperti Polda dan Kodam, pemerintah juga aktif mengajak masyarakat untuk melaporkan berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilaksanakan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum ini dibentuk atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018. Tujuan dari kewaspadaan dini di daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan

informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah. Anggota dari FKDM tersebut terdiri atas tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, atau elemen masyarakat lain. Dengan adanya FKDM ini, diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengontrol potensi konflik yang mungkin akan muncul di masyarakat. Karena fungsi utama FKDM adalah sebagai perpanjangan tangan dan mata dari pemerintah daerah.

Selain UU PKS No.7 Tahun 2012, Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga menggunakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 sebagai acuan dalam upaya pencegahan konflik bernuansa agama. PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Salah satu hal pokok yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan konflik bernuansa agama adalah menjaga kerukunan umat beragama. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang bersifat preventif. Adapun tugas dan kewajiban gubernur dalam pasal 5 PBM no. 9 dan 8 tahun 2006 terkait menjaga kerukunan umat beragama diantaranya yaitu:

- a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi
- b. Mengkoordinasikan kegiatan intansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama
- c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, dan
- d. Membina dan mengkoordinasikan bupati/wakil dan walikota/wakil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Dengan adanya PBM No. 9 dan 9 tahun 2006 tersebut, pemerintah daerah Sumatera Selatan memiliki panduan yang kuat dalam menjaga kerukunan umat beragama. Selain masalah kerukunan umat beragama, masalah lain yang sering sekali terjadi di Indonesia adalah sengketa pembangunan rumah ibadat. Sumatera Selatan sendiri beberapakali menghadapi sengketa pembangunan rumah ibadat. Namun dengan adanya PBM yang mengatur masalah pembangunan rumah ibadat, pemerintah daerah mampu menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat dengan mengacu pada PBM tersebut.

Cara (*ways*) yang kedua yaitu terkait *strategy operational*. *Strategy operational* merupakan kelanjutan dari kebijakan atau undang-undang tersebut di atas yang berisikan rencana-rencana yang harus dijalankan. *Strategy operational* dalam tingkat provinsi diatur oleh gubernur. Dalam hal upaya pencegahan konflik bernuansa agama, gubernur Sumatera Selatan memiliki beberapa *strategy operational*. Adapun diantaranya yaitu:

a. Menumbuhkan jiwa toleransi dalam masyarakat

Toleransi merupakan modal utama dalam menjaga harmonisasi kehidupan antar umat beragama. Toleransi umat beragama dimaknai sebagai pemberian kebebasan pada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Secara historis, tingginya tingkat toleransi beragama di Sumatera Selatan telah mengakar sejak berabad yang lalu. Pada masa keemasan kerajaan Sriwijaya, wilayah yang sekarang dikenal dengan Sumatera Selatan ini banyak dikunjungi oleh pedagang asing yang memiliki latar belakang agama yang berbeda (Arab, Cina, India). Sehingga keberagaman masyarakat di Sumatera

Selatan telah tercipta sejak lama. Keberagaman tersebut juga memberikan efek munculnya kehidupan yang toleran di bumi Sriwijaya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran raja Sriwijaya yang melindungi dan menghormati keberagaman masyarakatnya. Dengan adanya historis tingginya tingkat toleransi di Sumatera Selatan tersebut, mempermudah pemerintah daerah dalam menerapkan nilai-nilai toleransi di Sumatera Selatan. Walaupun demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah berhenti untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi.

Dalam setiap kesempatan, pemerintah daerah Sumatera Selatan selalu mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang arti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Oleh karena itu, poin menumbuhkan jiwa toleransi menjadi salah satu *plan* dalam *strategy operational* pemerintah daerah.

Selain pemerintah daerah, upaya menumbuhkan jiwa toleransi juga dilakukan oleh berbagai pihak terkait di Sumatera Selatan. Seperti para tokoh agama dan tokoh adat di Sumatera Selatan. Mengingat bahwa karakteristik masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap ulama. Sehingga dorongan dan motivasi yang dilakukan oleh para tokoh agama dapat mempercepat tumbuhnya jiwa toleransi dalam masyarakat Sumatera Selatan.

b. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. Hal tersebut dikarenakan kualitas umat beragama di Indonesia belum berfungsi seperti seharusnya, yang diajarkan oleh agama masing-masing. Sehingga ada kemungkinan timbul konflik di

antara umat beragama. Oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakannya.

Namun tidak hanya sebatas kerukunan antar umat beragama. Pemerintah daerah juga mengupayakan untuk menjaga tri kerukunan, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar ulama dan pemerintah daerah.

Kerukunan antar umat beragama merupakan poin penting dalam upaya menjaga kerukunan. Karena secara historis, perselisihan antar umat beragama merupakan konflik yang paling sering terjadi di Indonesia dan paling banyak menelan korban jiwa. Kemudian, kerukunan intern umat beragama. Menjaga kerukunan pada level intern umat beragama juga hal yang esensial. Hal tersebut mengingat pada masa sekarang ini, perpecahan di dalam umat juga menjadi potensi konflik yang patut untuk diperhitungkan. Dan terakhir yaitu kerukunan antar ulama dan pemerintah daerah. Pada level ini, kerukunan antar ulama dan pemerintah daerah harus dibina karena kedua pihak merupakan *role model* bagi masyarakat. Ketiga kerukunan tersebut penting untuk dijaga agar tercipta kerukunan yang komprehensif di seluruh lini kehidupan.

Cara (*ways*) yang ketiga yaitu terkait *strategy tactical*. *Strategy tactical* merupakan serangkaian agenda yang dilakukan untuk menjalankan *strategy operational* yang telah dimaksud di atas guna mencapai tujuan utama dari perumusan strategi ini. Adapun *strategy tactical* yang selama ini telah ditempuh oleh pemerintah daerah Sumatera

Selatan untuk mencegah konflik bernuansa agama dan mempertahankan status *zero conflict* adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sumatera Selatan adalah mengadakan sosialisasi terkait bahaya terorisme dan radikalisme. Belakangan ini, konflik bernuansa agama di Indonesia sangat berkaitan erat dengan terorisme dan radikalisme. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi menyeluruh ke semua elemen masyarakat mengenai bahaya terorisme dan radikalisme. Hal tersebut bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari paham radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan dibantu dengan instansi-instansi lain yang terkait.

Pemerintah Sumatera Selatan juga sering menggelar rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) se-Sumsel. Rapat tersebut digelar dalam rangka penenganan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta terorisisme di Sumsel. Selain untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi antara aparatur pemnerintah serta persiapan reaksi dini, rapat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas para aparatur pemerintah untuk mewaspadaai sejak dini munculnya konflik SARA dan terorisme.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi ke berbagai forum kepemudaan agar para pemuda Sumatera Selatan tidak mudah terpengaruh paham ekstrimis tersebut. Pada tahun 2018 ini, Sosialisasi atau workshop Aksi Terpadu penanganan Konflik Sosial Pemuda Mahasiswa telah dilangsungkan di Hotel 101 Palembang pada tanggal 27-29 Maret 2018. Sosialisasi tersebut diikuti 40 peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa organisasi pemuda seperti IPNU,

Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor, PII, HMI, PMII, GMKI, PKKD, DPD Peradah (Hindu), Sekber PMVBI (Buddha), dan OKP kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Para peserta menerima pembinaan atau materi dari pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel, Ketua FKUB Sumsel, dan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumsel. Dalam kesempatan tersebut, para pemuda mendapatkan banyak materi positif yang dapat menjadi penangkal tumbuhnya paham radikalisme.

Sosialisasi juga dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Selatan kepada FKUB tingkat kota/kabupaten. Hal ini penting dilaksanakan agar FKUB yang memegang peran penting dalam menjaga kerukunan umat, dapat memahami pentingnya mewaspadaai bahaya terorisme dan radikalisme. Sehingga ketika anggota FKUB turun ke masyarakat atau melakukan sosialisasi ke masyarakat, mereka dapat mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar. Jangan sampai, anggota FKUB yang notabene berisi para ulama dari perwakilan tiap-tiap agama menjadi provokator. Hal tersebut menjadi bahaya ketika ulama menjadi provokator meluasnya paham radikalisme, karena ulama di dalam masyarakat Sumatera Selatan sangat dipercayai dan dipatuhi. Masyarakat Sumatera Selatan mengasumsikan ulama sebagai pengayom ilmu agama, orang yang menguasai ilmu agama, dan dapat mengubah perilaku beragama masyarakat.

b. Optimalisasi peran lembaga keagamaan

Dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan, hal tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama. Di samping itu, pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot/warna tersendiri dalam menciptakan *ukhuwah*

(persatuan dan kesatuan) yang hakiki, tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga keagamaan dalam masyarakat sebagai perekat kerukunan antar umat beragama. Sama halnya dengan provinsi lain di Indonesia, Sumatera Selatan memiliki banyak lembaga atau organisasi keagamaan. Salah satu organisasi yang fokus menangani masalah kerukunan umat beragama adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Dalam hal ini, FKUB menjadi wadah utama bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengaktifkan dan memaksimalkan fungsi FKUB di semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Salah satu peran yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan yaitu dengan mengadakan dialog keagamaan. Dialog ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antar umat beragama sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya gesekan antar umat beragama di Sumatera Selatan. Dialog lintas agama tidak hanya dilakukan pada level ulama/petinggi keagamaan, tetapi juga dengan umat di lapisan bawah untuk memberikan pengertian tentang pentingnya membina dan mengembangkan kerukunan umat beragama.

c. Peningkatan sinergitas antar lembaga

Dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang aman dan kondusif, tentu diperlukan adanya kerjasama antar lembaga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mencegah terjadinya konflik bernuansa agama. Untuk menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah secara umum dibutuhkan adanya sinergitas dari pemerintah-TNI-Polri. Hal tersebut dikarenakan TNI dan Polri memegang peran sentral dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat menggerogoti keamanan wilayah. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan,

Alex Noerdin dalam Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018.

Salah satu bentuk sinergitas yang dilakukan oleh TNI dan Polri di Sumatera Selatan yaitu terkait insiden perusakan gereja Santo Zakaria di Rantau Alai, Ogan Ilir yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 01.00 dini hari. Pada pagi harinya, jajaran Polri dan TNI langsung bekerjasama dengan melakukan penjagaan dan olah TKP untuk menghindari kejadian-kejadian lanjutan yang tidak diinginkan.²² TNI dan Polri dalam hal ini juga menjalankan sistem deteksi dini dan respon dini. Untuk deteksi dini, Polda Sumatera Selatan memiliki badan Intelkam yang menjalankan tugas intelijen untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh instansi. Kemudian selanjutnya apabila terdapat informasi sebuah konflik terjadi, dalam hal ini mengenai konflik bernuansa agama, Polda Sumatera Selatan kemudian dengan cepat merespon insiden tersebut sebelum insiden meluas menjadi kekerasan fisik.

Selain sinergitas yang dilakukan antara TNI-Polri, sinergitas tersebut juga terjadi antar lembaga lain seperti antara Kesbangpol Sumatera Selatan, Kanwil Kemenag Sumsel, dan FKUB Sumatera Selatan yang saling besinergi mengatasi berkenaan dengan perselisihan pembangunan rumah ibadat. Karena selama ini, konflik yang terjadi di Sumatera Selatan baru sebatas perselisihan pendirian rumah ibadat.

Sinergitas antar lembaga yang sangat solid ini sangat membantu pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam mencegah konflik bernuansa agama. Hal ini juga yang mengantarkan pemerintah daerah meraih peringkat 3 dalam upaya pencegahan konflik sosial dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

²² Detik.com, "Kronologi Perusakan Gereja di Sumsel hingga Pelaku Ditangkap", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3926165/kronologi-perusakan-gereja-di-sumsel-hingga-pelaku-ditangkap> diakses pada 5 Desember 2018.

- d. Kesigapan dalam mengatasi konflik yang berpotensi pada perpecahan umat

Salah satu aksi dalam *strategy tactical* pemerintah daerah Sumatera Selatan yaitu adanya kesigapan dari segala lini dalam mengatasi konflik yang berpotensi pada perpecahan umat. Pemerintah daerah menginginkan adanya aparat lembaga yang bersifat responsif akan segala potensi konflik bernuansa agama yang muncul di Sumatera Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari meluapnya konflik menjadi sebuah kekerasan yang dapat melukai persatuan dan kesatuan masyarakat Sumatera Selatan yang telah terjalin dengan harmonis.

Kesigapan ini juga berbanding lurus dengan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Karena koordinasi yang cepat antar instansi menjadi salah satu kunci dalam penanganan potensi konflik. Selain koordinasi resmi yang rutin, koordinasi tidak resmi menjadi langkah utama menghadapi hambatan birokrasi. Di samping itu, penggunaan teknologi (SMS, WA group, email) sangat membantu penyebaran informasi bagi kebutuhan koordinasi seluruh instansi. Rencana-rencana aksi dan pemetaan potensi konflik dilaksanakan secara rutin dan diperbaharui terus-menerus. Para pimpinan juga tidak segan-segan turun untuk memastikan penanganan konflik telah sesuai, dengan kesigapan tinggi, bahkan waktu penanganan kurang dari 24 jam sebelum konflik meluas.